

HARMONISASI POLARISASI POLITIK MASYARAKAT PASCA PEMILU 2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA

Abd. Mu'id Aris Shofa¹⁾, Mifdal Zusron Alfaqi²⁾, M. Mujtaba Habibi³⁾, Zulfikar W
Fattah⁴⁾, Ahmad Faizuddin Ramli⁵⁾, Pipit Widiatmaka⁶⁾

¹Prodi PPKn, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email: abd.muid.fis@um.ac.id

²Prodi PPKn, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email: mifdal.zusron.fis@um.ac.id

³Prodi PPKn, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email: m.muftaba.fis@um.ac.id

⁴Prodi PPKn, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email: zulfikar.fattah.fis@um.ac.id

⁵Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Malaysia

Email: faizuddin@fsk.upsi.edu.my

⁶Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak, Indonesia

Email: pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) strategi mengatasi polarisasi politik yang terjadi di Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024, (2) kendala dalam mengatasi polarisasi politik masyarakat Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024, dan (3) implikasinya terhadap ketahanan daerah di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif. Obyek penelitian ini terkait polarisasi masyarakat pasca pemilu dan ketahanan daerah di kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi polarisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta dengan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan dialog, sosialisasi, pertemuan rutin pemerintah desa dengan masyarakat, ketua RT dan RW, gotong royong dan pengajian. Namun, dalam harmonisasi tersebut, ternyata terdapat kendala yaitu adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan provokasi terhadap masyarakat dan masih ada beberapa orang yang secara tidak langsung sedang konflik karena sakit hati karena pilihannya di pemilu 2024 tidak terpilih. Harmonisasi tersebut berimplikasi pada ketahanan daerah di Kota Surakarta yang semakin tangguh karena eksistensi Pancasila sebagai ideologi dapat terjaga, masyarakat Surakarta semakin dewasa dalam berdemokrasi, perekonomian daerah meningkat, kehidupan sosial budaya semakin harmonis, karena mengedepankan sikap toleransi dan keamanan dapat terjaga dengan baik.

Kata Kunci: Harmonisasi; Polarisasi Politik; Pemilu 2024; Ketahanan Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out (1) strategies for overcoming political polarization that occurs in Surakarta City after the 2024 Elections, (2) obstacles in overcoming political polarization in the people of Surakarta City after the 2024 Elections, and (3) its implications for regional resilience in Surakarta City. This study uses a qualitative approach with a descriptive research method, data collection techniques using in-depth interviews, observations, and documentation, and the data analysis used is interactive. The object of this research is related to the polarization of society after the election and regional resilience in the city of Surakarta. The results of the study show that the harmonization of political polarization carried out by the Surakarta city government in collaboration with all levels of society through dialogue activities, socialization, regular meetings of the village government with the community, heads of RT and RW, cooperation and recitation. However, in the

harmonization, it turns out that there are obstacles, namely the existence of irresponsible individuals who provoke the community and there are still some people who are indirectly in conflict because they are hurt because their choice in the 2024 election is not elected. This harmonization has implications for regional resilience in the city of Surakarta which is increasingly resilient because the existence of Pancasila as an ideology can be maintained, the people of Surakarta are increasingly mature in democracy, the regional economy is increasing, socio-cultural life is more harmonious because prioritizing tolerance and security can be well maintained.

Keywords: Harmonization; Political Polarization; 2024 Elections; Regional Resilience.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Siboy, 2022). Tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk mewujudkan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara dan tujuan nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia (Subiyanto, 2020). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nuryadi & Widiatmaka, 2024). Sistem pemilu di Indonesia tahun 2024 adalah proporsional terbuka sehingga mendorong calon untuk bersaing untuk mendapatkan suara dari rakyat agar bisa memperoleh kursi di parlemen. Sistem proporsional terbuka memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dan dipilih, namun dampak negatifnya para pemilih (rakyat) dapat terbelah karena memiliki pilihan berbeda sehingga berpotensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat (Khairunnisa & Fatimah, 2023).

Sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, dan 17.610 anggota DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Prayatno & Susilowati, 2023). Pemilu serentak tersebut pertama diselenggarakan pada tahun 2019 dan meninggalkan beragam masalah, seperti banyak terjadi politik uang dan isu SARA sehingga menimbulkan konflik dan polarisasi di tengah masyarakat (Cynthia, 2022). Permasalahan politik uang dan isu SARA di pemilu serentak 2024 terulang kembali dan berdampak pada polarisasi masyarakat (Riyanda et al., 2024). Bawaslu dan Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memaparkan di daerah Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar) pada pemilu serentak 2024 rawan terjadinya konflik horizontal yang berpotensi pada perpecahan (Kurniawan, 2024). Hal tersebut terbukti dengan terjadinya kasus di beberapa daerah di Solo Raya, seperti peristiwa kekerasan anggota TNI terhadap relawan salah satu calon Presiden, Kepala Desa mengarahkan warganya untuk memilih salah satu calon peserta pemilu, ASN yang tidak netral, politik uang dan kasus SARA (Faizah & Meidinata, 2024). Kasus lain, yang berdampak pada polarisasi masyarakat di Surakarta adalah rusaknya surat suara sebanyak 26.177 untuk pemilu 2024 dan untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 5.109 (Wibowo, 2024).

Hasil penghitungan secara cepat atau quick count yang angkanya lebih dari 55 % (Prabowo-Gibran) dan pilpres berpotensi hanya dilakukan satu putaran, kemudian banyak berita yang berkembang di media sosial terkait dugaan kecurangan dalam

pemilu membuat terjadinya ketegangan di tengah masyarakat (Rizky, 2024). Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi kerukunan masyarakat di Kota Surakarta mengingat Kota tersebut memiliki sejarah yang buruk terkait tindakan intoleransi khususnya tindakan terorisme. Selain itu, hasil survey Setara Institut terkait peringkat Kota Toleran di tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Surakarta turun peringkat dari peringkat 4 di tahun 2022 menjadi peringkat 10 di tahun 2023 (Sulistyowati & Rusiana, 2024). Berdasarkan hal ini, tidak dipungkiri sering terjadi beberapa kasus intoleransi di Kota Surakarta yang berdampak pada terjadinya polarisasi masyarakat dan polarisasi politik.

Polarisasi politik di Surakarta berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden yang umurnya di bawah 40 tahun selama sudah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Melalui dasar tersebut Gibran Rangkabumi anak dari Presiden Jokowi mencalonkan menjadi wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Kemudian terjadilah ketegangan antara pendukung Prabowo-Gibran dengan pendukung Ganjar Pranowo yang notabene suara masyarakat di Surakarta pada pemilu 2019 sebagian besar memilih PDIP (Hasanah et al., 2024). Polarisasi politik masyarakat di Kota Surakarta berimplikasi pada ketahanan daerah di Kota Surakarta, karena mempengaruhi eksistensi Pancasila, perekonomian di Kota Surakarta, stabilitas politik kehidupan sosial budaya, dan keamanan di Kota Surakarta.

Polarisasi politik pada dasarnya merujuk pada perpecahan yang terjadi antar kelompok politik di tengah masyarakat yang berpotensi pada konflik (Masykuri & Ramadlan, 2021). Polarisasi politik bisa terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau pendapat, tujuan, nilai atau ideologi berbeda dapat yang dapat memisahkan masyarakat menjadi beberapa kelompok

yang bertentangan atau bersebrangan (Khasanah & Wawuan, 2023). Perbedaan nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh kelompok tertentu dapat memicu terjadinya perpecahan politik, nilai-nilai tersebut berkaitan dengan moralitas, keadilan, agama, atau prinsip yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan politik kelompok tersebut (Baidawi & Novianti, 2022).

Pada dasarnya polarisasi politik menimbulkan terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat dan polarisasi politik tidak hanya terjadi di negara-negara otoriter saja, melainkan juga negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi (Akmaliah, 2019). Polarisasi politik sering terjadi di dalam isu-isu sosial budaya, penentuan kebijakan publik, pemilihan umum dan lain sebagainya. Penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Andriyani et al., (2021) tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam menanggulangi konflik sosial untuk mendukung ketahanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan ada 4,3 % hubungan pertemanan menjadi rusak karena pemilu dan ada 5,7 % hubungan sosial menjadi tegang pasca Pemilu Kota Provinsi Jakarta. Pola untuk mengantisipasi terjadinya konflik pasca pemilu dan pemilu terdorong kurang serius dan cenderung dibiarkan oleh pemerintah lokal dan elit politik lokal. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Syarwi (2022) tentang polarisasi isu, politik identitas dan keterbelahan pemilu tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan polarisasi isu dan politik identitas dalam pemilu 2019 berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut harus segera diantisipasi mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan cara adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Nashrullah (2023) tentang polarisasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia dalam konteks sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya polarisasi politik dalam pemilu yang terus berlanjut akan berdampak pada terjadinya disintegrasi nasional. Selain itu, hal tersebut juga berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Solusi yang harus dilakukan dengan cara penguatan komunikasi publik yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Penelitian ini pada dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Andriyani et al., (2021) menekankan pada peran pemerintah lokal dalam mengantisipasi konflik untuk mendukung ketahanan sosial sedangkan penelitian ini menekankan pada polarisasi politik masyarakat pasca pemilu 2024 dan ketahanan daerah. Penelitian yang dilakukan Syarwi (2022) menekankan pada politik identitas dan keterbelahan pemilu 2019 sedangkan penelitian ini menekankan pada polarisasi politik masyarakat pasca pemilu 2024 dan ketahanan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nashrullah (2023) menekankan pada polarisasi masyarakat dalam pemilu dalam konteks sosiologi hukum sedangkan penelitian ini menekankan pada polarisasi politik masyarakat pasca pemilu 2024 dan ketahanan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) strategi mengatasi terjadinya polarisasi politik di Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024, (2) kendala dalam mengatasi polarisasi politik masyarakat Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024, dan (3) implikasinya terhadap ketahanan daerah Kota Surakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena berusaha untuk mendeskripsikan tentang strategi dan kendala dalam mengatasi polarisasi politik di Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024 serta implikasinya terhadap ketahanan daerah Kota Surakarta. Penelitian

ini dilakukan di Kota Surakarta dan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 hingga Juli 2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sumber data skunder (dokumentasi yang berupa artikel, buku, proseding, berita online dan lain sebagainya).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) wawancara mendalam dan cenderung lebih memilih informan kunci (*key informan*) yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendalam/wawancara mendalam (*in-depth interview*). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan dan Bangsa Kota Surakarta (1 informan) dan tokoh masyarakat di Kota Surakarta (5 informan) sehingga jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 informan. (2) observasi partisipan, peneliti secara langsung melakukan observasi ke lapangan dengan menekankan tiga indikator, yaitu a) *Place*, yaitu observasi tempat kegiatan yang berkaitan dengan harmonisasi masyarakat, b) *Actor* yaitu peran aktor lokal (pemerintah desa, Camat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya) dan c) *Activity*, yaitu kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketahanan daerah (eksistensi Pancasila, perekonomian di Kota Surakarta, stabilitas politik di Kota Surakarta, kehidupan sosial budaya, dan keamanan), dan (3) dokumentasi, data tersebut berupa berita online tentang konflik selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024 di Kota Surakarta, artikel jurnal, buku, proseding dan lain sebagainya.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode sehingga data yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan observasi dan dokumentasi dan tujuannya adalah agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Hasil dari uji keabsahan data yang menggunakan

teknik triangulasi metode sudah dilakukan dalam penelitian ini sehingga memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif dengan prosedur pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah (1) persiapan (menentukan pedoman wawancara dan observasi di lapangan) (2) pengumpulan data (pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi), (3) analisis data (melakukan analisis dengan menggunakan analisis data interaktif), dan (4) penyusunan laporan/artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Untuk Mengatasi Polarisasi Politik di Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024

Pasca pemilu 2024 terjadi suatu polarisasi politik di Indonesia khususnya di Kota Surakarta setelah terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden periode 2024-2029. Hal ini harus segera diantisipasi dengan melakukan harmonisasi kehidupan untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Harmonisasi dalam kajian filsafat, harmoni adalah kerja sama dari berbagai unsur yang menghasilkan satu kesatuan yang utuh dan luhur (Riani, 2022). Di dalam pendekatan sosiologi, Shadzily menjelaskan harmoni adalah sebagai suatu bentuk usaha untuk meleraikan atau mempertemukan beragam polarisasi atau pertentangan yang terjadi di tengah masyarakat (Sopiyan et al., 2022). Pada dasarnya harmonisasi merupakan proses untuk menjadikan beragam unsur yang bertentangan atau memiliki pertentangan menjadi satu kesatuan yang utuh (Nuryadi & Widiatmaka, 2022a).

Harmonisasi merupakan cara yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah agar polarisasi politik tidak terjadi hingga berujung pada konflik masyarakat (Nuryadi & Widiatmaka, 2022a). Pemerintah

Surakarta khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta melakukan dialog dengan masyarakat khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama secara rutin agar dampak yang ditimbulkan pemilu 2024 tidak berujung pada konflik. Indradi selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pemilu 2024 sudah selesai serta calon presiden dan wakil presiden sudah terpilih, perbedaan pilihan itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, yang terpenting adalah seluruh masyarakat khususnya di Kota Surakarta harus dapat menerima hasil dari pemilu 2024 dan yang lebih penting masyarakat harus dapat mengedepankan sikap toleransi agar konflik politik ini tidak berlarut-larut hingga berujung konflik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta selalu melakukan dialog dengan masyarakat Kota Surakarta untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok terbatas, dan lain sebagainya (wawancara, 23 Mei 2024).

SW yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon menjelaskan adalah pasca pemilu 2024 atau setelah terpilihnya Prabowo-Gibran, masyarakat di Kota Surakarta terjadi ketegangan terutama antara pemilih Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Namun, polarisasi politik tersebut tidak berujung pada konflik antar masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena di setiap desa terutama kepala desa atau lurah bekerja sama dengan ketua RT dan ketua RW untuk selalu melakukan kegiatan yang dapat mencairkan ketegangan tersebut, seperti kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, pertemuan rutin di balai desa, ada juga yang mengadakan kegiatan pengajian. Jadi yang melakukan kegiatan persatuan dan kesatuan masyarakat di Kota Surakarta tidak hanya pemerintah kota saja, melainkan juga ketua RT dan RW yang berada di kampung (Wawancara, 23 Mei 2024).

Masyarakat kota Surakarta pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup rukundandamai meskipun terjadi ketegangan politik pasca pemilu 2024 mengingat adanya kesadaran masyarakat bahwa konflik di tengah masyarakat tidak menguntungkan dan hanya merugikan. Melalui kesadaran dari masyarakat tersebut, maka pemerintah kota Surakarta dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya konflik pasca pemilu 2024 tidak kesulitan, meskipun menemui beberapa kendala dan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan kerukunan di tengah masyarakat pasca pemilu 2024 terjalin dengan baik dan lancar.

JS yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Jebres menjelaskan bahwa ketegangan antar masyarakat pasca pemilu 2024 di Surakarta dapat diantisipasi dengan baik. Meskipun terjadi ketegangan politik, namun hingga saat ini tidak terjadi konflik antar masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena peran tokoh agama terutama agama Islam yang selalu menyerukan persatuan dan kesatuan di setiap kegiatan pengajian sehingga saat ini kerukunan antar sesama dapat berjalan dengan baik dan kondusif (Wawancara, 23 Mei 2024).

Berdasarkan keterangan dari Waskito seorang akademisi dari Universitas Sebelas Maret dalam kegiatan dialog interaktif dengan tema “Merajut Kedamaian Pasca Pemilu 2024” menjelaskan bahwa pasca pemilu 2024 di kota Surakarta tidak terjadi konflik, meskipun terjadi ketegangan politik atau polarisasi politik selama pemilu 2024 (Marsudi, 2024). Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 22-26 Mei 2024 menunjukkan bahwa kerukunan antar sesama di Kecamatan Pasar Kliwon, Banjarsari, dan Jebres terjaga dengan baik, bahkan kerukunan antar perbedaan agama dan etnis terjalin dengan baik. Aktivitas masyarakat di kota Surakarta sudah kembali rukun dan keharmonisan kehidupan antar masyarakat terjalin dengan baik.

Harmonisasi polarisasi politik di Surakarta pasca pemilu 2024 dilakukan dengan baik oleh pemerintah kota Surakarta yang bekerja sama dengan kepala desa, ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut selaras dengan teori yang disampaikan oleh Irfan (2024) yang menjelaskan bahwa upaya untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi politik yang berpotensi pada konflik, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. memperkuat pendidikan politik untuk masyarakat
- b. memberi ruang diskusi atau dialog
- c. memperkuat peran lembaga yang merupakan pilar demokrasi, seperti media massa, LSM, partai politik dan lain sebagainya

Strategi harmonisasi politik pasca pemilu 2024 yang pemerintah kota Surakarta adalah dengan cara melakukan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta yaitu dengan mengadakan kegiatan dialog, gotong royong membersihkan lingkungan, pengajian, pertemuan rutin di balai desa. Melalui kegiatan tersebut, ternyata dapat menurunkan ketegangan politik pasca pemilu 2024, namun cara tersebut sangat efektif sehingga kerukunan di tengah masyarakat kota Surakarta dapat terjalin dengan baik.

Kendala Dalam Mengatasi Polarisasi Politik Masyarakat di Kota Surakarta Pasca Pemilu 2024

Polarisasi politik pasca pemilu 2024 tidak hanya terjadi di Kota Surakarta, namun di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya dan lain sebagainya. Namun, polarisasi politik pasca pemilu 2024 tidak berujung pada konflik antar masyarakat (Muhtar, 2024). Pada dasarnya hal ini menunjukkan adanya proses kedewasaan bagi masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Apabila dibandingkan antara pemilu 2024 dengan pemilu 2019 yang lalu menunjukkan bahwa ketegangan politik

atau polarisasi politik lebih kuat di pemilu 2019 dari pada pemilu 2024 (Juanda & Iskandar, 2024).

Polarisasi politik di Kota Surakarta dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama kepala desa, ketua RT dan ketua RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Namun, dalam melakukan harmonisasi polarisasi politik tersebut ternyata juga mengalami kendala meskipun tujuan untuk membangun masyarakat yang damai, kondusif dan mengedepankan sikap toleransi dapat tercapai dengan baik. Kendala tersebut, menurut SJ seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Serengan adalah adanya beberapa orang yang berusaha untuk memprovokasi masyarakat agar ketegangan politik semakin kuat, misal memprovokasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi ke KPU di Kota Surakarta mengenai kecurangan pemilu, padahal bukti kecurangan tersebut tidak ditemukan dan tidak ada (Wawancara, 24 Mei 2024).

Harmonisasi ketegangan politik pasca pemilu 2024 meskipun berjalan dengan baik dan lancar, namun ternyata terdapat kendala sehingga pemerintah kota Surakarta yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat berusaha untuk mengantisipasi kendala tersebut agar proses harmonisasi berjalan dengan baik. Provokasi dari oknum tertentu menjadi kendala utama dalam harmonisasi tersebut, namun hal ini dapat diantisipasi dengan cara berdialog dengan pihak-pihak terkait terutama dengan tokoh agama.

KN yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Kaweyan menjelaskan bahwa usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Kota Surakarta pasca pemilu 2024 mengalami kendala, yaitu masih ada beberapa orang yang sakit hati karena perbedaan pilihan, kemudian yang pilihannya terpilih di pemilu 2024

melakukan tindakan mencemooh beberapa orang yang pilihannya tidak terpilih. Hingga saat ini, beberapa orang tersebut menunjukkan secara tidak langsung sedang berkonflik, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama tergolong berhasil karena polarisasi politik di Kota Surakarta tidak berujung pada tindakan anarki atau konflik fisik (Wawancara, 24 Mei 2024). SK seorang warga Kota Surakarta menjelaskan bahwa kendala yang dialami ketika melakukan harmonisasi ketegangan politik yaitu masih adanya oknum yang melakukan provokasi masyarakat untuk menolak hasil pemilu 2024. Namun, orang-orang tersebut, tidak memiliki bukti yang jelas terkait kecurangan pemilu dan masyarakat Surakarta hingga saat ini tidak terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, sehingga kerukunan antar masyarakat dapat terjaga dengan baik (Wawancara, 25 Mei 2024).

Pada dasarnya pemilu 2024 yang diselenggarakan di Kota Surakarta tidak banyak mengalami kendala, pemilu tersebut berjalan dengan baik, aman dan kondusif, namun hanya terjadi polarisasi di tengah masyarakat yang tidak berdampak pada tindakan anarki atau tindakan radikal sehingga pasca pemilu 2024 di Kota Surakarta masih tergolong aman dan kondusif. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi khususnya masyarakat di kota Surakarta.

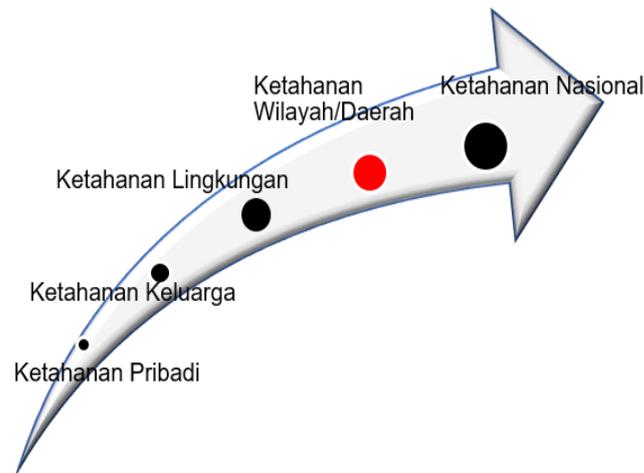
Perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan indikator dari demokrasi dan hal ini bukan menjadi suatu permasalahan (Widiatmaka & Yuliandari, 2024). konsep tersebut ternyata dapat diimplementasikan oleh masyarakat di Kota Surakarta. Pada dasarnya kendala yang dialami oleh pemerintah kota Surakarta dengan tokoh masyarakat dalam rangka untuk melakukan harmonisasi polarisasi masyarakat pasca

pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala. Kendala dalam melakukan harmonisasi polarisasi masyarakat pasca pemilu 2024 di Kota Surakarta adalah adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan provokasi terhadap masyarakat dan masih ada beberapa orang yang secara tidak langsung sedang konflik karena sakit hati karena pilihannya di pemilu 2024 tidak terpilih.

Implikasinya terhadap Ketahanan Daerah di Kota Surakarta

Ketahanan daerah merupakan turunan dari ketahanan nasional dan berfungsi

untuk mengukur kondisi ketahanan di suatu wilayah/daerah, sehingga ketahanan wilayah/daerah merupakan kondisi dinamis masyarakat di suatu daerah yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari dalam dan luar daerah (Budiman, dkk., 2021). Soedarsono dalam Widiatmaka et al. (2023) memaparkan bahwa ketahanan nasional memiliki beberapa turunan, yaitu ketahanan daerah/wilayah, ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan ketahanan pribadi. Berikut gambar turunan atau hirarki ketahanan nasional hingga ketahanan pribadi:



Gambar 1. Hirarki Ketahanan Nasional

Sumber : Soedarsono dalam Widiatmaka et al. (2016)

Ketahanan daerah pada dasarnya berdampak secara langsung terhadap tangguh atau tidaknya ketahanan nasional, sehingga ketahanan daerah yang tangguh menjadi sangat penting untuk mewujudkan ketahanan nasional (Nuryadi & Widiatmaka, 2022b). Ketahanan nasional menjadi sangat penting bagi Indonesia mengingat ketahanan nasional tidak hanya sebagai konsepsi politik saja, tetapi juga untuk menunjang tugas utama pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum (Armawi & Wahidin, 2018).

Ketahanan daerah memiliki implikasi pada ketahanan nasional sehingga polarisasi politik yang terjadi di kota Surakarta Pasca pemilu 2024 berdampak secara langsung terhadap ketahanan nasional. Namun, karena polarisasi politik di tengah masyarakat dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah kota Surakarta yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat tidak berakibat pada lemahnya ketahanan daerah di kota Surakarta dan ketahanan nasional.

Menurut Soedarsono dalam Nuryadi & Widiatmaka (2022) menjelaskan bahwa

ketahanan daerah di suatu daerah tertentu pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu:

a. Ideologi

Eksistensi Pancasila sebagai ideologi di Kota Surakarta masih terjaga dengan baik, karena selama pemilu 2024 tidak ada ancaman untuk menggantikan atau merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Adanya proses harmonisasi polarisasi politik pasca pemilu 2024 di Kota Surakarta menunjukkan bahwa semakin kuatnya eksistensi Pancasila sebagai ideologi, bahkan kerukunan antar perbedaan semakin harmonis, karena tidak terjadi konflik. Kuatnya eksistensi Pancasila sebagai ideologi berimplikasi pada ketahanan daerah di Kota Surakarta semakin tangguh. Berdasarkan wawancara dengan WK seorang warga Kota Surakarta menjelaskan bahwa masyarakat Surakarta masih tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi, meskipun ketika pemilu 2024 terjadi polarisasi politik, karena Pancasila harga mati untuk tetap diyakini kebenarannya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Wawancara, 23 Mei 2024).

b. Politik

Pasca pemilu 2024, meskipun terjadi polarisasi politik tetapi tidak terjadi hingga konflik di tengah masyarakat/tindakan anarki. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap kedewasaan masyarakat kota Surakarta dalam berdemokrasi. Apalagi setelah adanya harmonisasi dari polarisasi politik yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat (pemerintah kota bekerja sama dengan masyarakat), kehidupan masyarakat Surakarta semakin harmonis dan tidak ada intimidasi pasca pemilu 2024. Fenomena tersebut menunjukkan eksistensi demokrasi di Kota Surakarta masih tetap terjaga dan kerukunan masyarakat masih tetap berjalan secara harmonis.

c. Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian di Kota Surakarta di tahun 2023 semakin meningkat yaitu mencapai 5,57 persen, angka tersebut melampaui pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 5,05 persen. Trend meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Surakarta selalu terjadi di setiap tahunnya (Ryanthie & Widyastuti, 2024). Berdasarkan wawancara dengan SJ seorang warga Kota Surakarta menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Surakarta saat ini masih tetap terkendali, masyarakat masih tetap melakukan jual-beli meskipun harga bahan pokok cenderung naik, apalagi ketika Idul Fitri. Namun, perekonomian di Kota Surakarta masih tetap terjaga dan tidak ada penurunan (Wawancara, 25 Mei 2024)

d. Kehidupan sosial budaya

Keharmonisan kehidupan di Kota Surakarta tergolong harmonis, karena pasca pemilu 2024 tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, bahkan kehidupan antar perbedaan terutama antar agama dan etnis semakin harmonis. Berdasarkan wawancara dengan SW yang merupakan warga Kota Surakarta menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir di Kota Surakarta tidak pernah terjadi konflik antar perbedaan, bahkan sebelum dan setelah pemilu 2024 tidak terjadi konflik di tengah masyarakat (Wawancara, 23 Mei 2024). Hal tersebut menunjukkan keharmonisan kehidupan sosial budaya di kota Surakarta masih tergolong baik dan harmonis.

e. Keamanan

Keamanan di Kota Surakarta pasca pemilu 2024 masih tergolong aman, karena tidak ada pelanggaran atau tindakan pidana terkait pemilu 2024, meskipun terjadi polarisasi politik di tengah masyarakat, namun keamanan masih tetap terkendali. Berdasarkan wawancara dengan KN seorang warga

Kota Surakarta menunjukkan bahwa keamanan di Kota Surakarta selama pemilu 2024 masih tetap terjaga dan tidak ditemui konflik masyarakat yang berujung pada tindakan penganiayaan atau tindakan anarki (Wawancara, 25 Mei 2024).

Berdasarkan analisis indikator dari ketahanan daerah di Kota Surakarta menunjukkan bahwa eksistensi Pancasila masih tetap terjaga selama pemilu 2024, perekonomian di Kota Surakarta semakin meningkat, masyarakat di Kota Surakarta semakin dewasa dalam berdemokrasi, kehidupan sosial budaya semakin harmonis karena masyarakat Kota Surakarta mengedepankan sikap toleransi, dan keamanan selama pemilu 2024 masih tetap terkendali karena tidak ada konflik di tengah masyarakat.

Pasca pemilu 2024 ketahanan daerah di kota Surakarta masih tergolong tangguh, mengingat polarisasi politik yang terjadi di tengah masyarakat di kota Surakarta dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah kota Surakarta yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama melalui kegiatan musyawarah dan gotong royong.

SIMPULAN

Pemilu 2024 merupakan pemilu yang tergolong menegangkan mengingat sebelum diselenggarakan pemilu 2024, polarisasi politik di tengah masyarakat sangat kuat. Hal ini terjadi pada masyarakat yang berada di Kota Surakarta, namun polarisasi tersebut tidak berujung pada tindakan anarki. Pasca pemilu 2024 kondisi di tengah masyarakat masih terasa tegana sehingga pemerintah Surakarta melakukan usaha untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh agama untuk mengantisipasi terjadinya konflik di tengah masyarakat. Harmonisasi

polarisasi politik yang dilakukan di Kota Surakarta dengan cara pemerintah kota Surakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat secara berkala serta melakukan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan dialog, sosialisasi, pertemuan rutin pemerintah desa dengan masyarakat di balai desa, ketua RT dan RW melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan pengajian.

Harmonisasi masyarakat pasca pemilu 2024 ternyata juga mengalami kendala karena terdapat beberapa kendala yaitu adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan provokasi terhadap masyarakat dan masih ada beberapa orang yang secara tidak langsung sedang konflik karena sakit hati karena pilihannya di pemilu 2024 tidak terpilih. Harmonisasi tersebut berimplikasi pada ketahanan daerah di Kota Surakarta semakin Tangguh karena eksistensi Pancasila sebagai ideologi dapat terjaga, masyarakat Surakarta semakin dewasa dalam berdemokrasi, perekonomian daerah meningkat, kehidupan sosial budaya semakin harmonis, dan keamanan dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliah, W. (2019). Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral. *Maarif*, 14(1), 129–149.
- Andriyani, L., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39–64. <https://doi.org/> <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>
- Armawi, A., & Wahidin, D. (2018). Ketahanan Nasional dan Bela Negara. *Majalah Wira: Edisi Khusus Bela Negara*, 6–11.

- Baidawi, A., & Novianti, N. (2022). Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 393–402.
- Budiman, D., Kapiarsa, A. B., Waidah, D. F., Prayuda, H., & Ramadhan, T. Y. R. (2021). Ketahanan Wilayah Kabupaten Karimun Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Kesehatan Karimun dan Juru Bicara Gugus. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 329–347.
- Cynthia, A. F. (2022). *Tito: Kita Belajar di 2019, Kampanye 7 Bulan Politik SARA yang Keluar*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6031165/tito-kita-belajar-di-2019-kampanye-7-bulan-politik-sara-yang-keluar>
- Faizah, N., & Meidinata, N. (2024). *Bingkai Boyolali Viral dalam Pusaran Pemilu dan Pilpres 2024*. Solo Pos. <https://soloraya.solopos.com/bingkai-boyolali-viral-dalam-pusaran-pemilu-dan-pilpres-2024-1832418>
- Hasanah, M. U., Widiastuti, W., & Makhrian, A. (2024). Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024: Analisis Framing Pada Media Kompas.com dan CNN Indonesia (Edisi 16-25 Oktober 2023). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 988–999. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.586>
- Irfan, M. (2024). *Polarisasi Politik dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. JDIH Kabupaten Sukoharjo. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/polarisasi-politik-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat#:~:text=Polarisasi politik merupakan fenomena yang, sehingga sulit untuk mencapai konsensus.>
- Juanda, J., & Iskandar, O. (2024). Politik Identitas dan Alat Pemenangan Kontestasi dalam Pemilu yang akan Mendatang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.55904/nautical.v2i10.1096>
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.311>
- Khasanah, I. L., & Wawuan, F. Z. (2023). Polarisasi Politik dan Upaya Rekonsiliasi melalui Halal Bihalal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 420–429. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.420-429>
- Kurniawan, A. (2024). Soloraya Masuk Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024, Ini Kata Kesbangpol Jateng. Solo Pos. <https://jateng.solopos.com/soloraya-masuk-daerah-rawan-konflik-di-pemilu-2024-ini-kata-kesbangpol-jateng-1737652>
- Marsudi, A. (2024). *Pemilu Pemilu; di Masyarakat Damai, di Medsos Kurang Damai*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/index.php/pemilu/577450/pemilu-di-masyarakat-damai-di-medsos-kurang-damai>
- Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 68–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.68-87>
- Muhtar. (2024). *Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan DPRD*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka.
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian

- Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2), 20–38.
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022a). Harmonisasi Antar Etnis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kalimantan Barat Pada Era Society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 101–119. <https://doi.org/10.22146/jkn.73046>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022b). Terpaparnya Paham Radikalisme pada Mahasiswa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 766–775. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p766-775>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2024). Democracy Education As A Vehicle to Anticipate the Development of SARA Politics in Elections. *Jurnal Paedagogy*, 11(1), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v11i1.9805>
- Prayatno, C., & Susilowati, T. (2023). Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 168–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495>
- Riani, N. K. (2022). Harmonisasi Menuju Pelayanan Publik Yang Smart. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 535–542. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1705>
- Riyanda, R., Arman, Z., Haskar, E., & Jannah, M. (2024). Pembinaan Kesadaran Hukum Dan Hak Politik terhadap Warga Binaan Bapas II Bukittinggi. *Puan Indonesia*, 5(2), 387–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.175>
- Rizky, M. (2024). *Prabowo-Gibran Menang di Quick Count, Ini Jawaban Tak Terduga Anies*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240214190930-4-514369/prabowo-gibran-menang-di-quick-count-ini-jawaban-tak-terduga-anies>
- Ryanthie, S., & Widyastuti, A. Y. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Solo 5,57 Persen, Deputi Gubernur BI: Di Dunia Tak Ada yang Mencapai 5 Persen, Kecuali India*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1840093/pertumbuhan-ekonomi-solo-557-persen-deputi-gubernur-bi-di-dunia-tak-ada-yang-mencapai-5-persen-kecuali-india>
- Siboy, A. (2022). Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Arena Hukum*, 15(1), 200–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10>
- Sopiyan, W., Hidayat, R. H., Setiawati, R., & Hadi, F. N. (2022). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Beragama Sebagai Mediasi Konflik Sosial. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 20(02), 219–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v20i02.381>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sulistyowati, F. I., & Rusiana, D. A. (2024). *Peringkat Kota Toleran Solo Turun Drastis, dari Rangking 4 Jadi 10*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/01/050300978/peringkat-kota-toleran-solo-turun-drastis-dari-rangking-4-jadi-10>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>
- Wibowo, E. A. (2024). *KPU Solo Temukan 26.177 Surat Suara Pemilu 2024*

Rusak: Kertas Sobek hingga Terkena Luberan Tinta. Tempo. <https://pemilu.tempo.co/read/1823194/kpu-solo-temukan-26-177-surat-suara-pemilu-2024-rusak-kertas-sobek-hingga-terkena-luberaan-tinta>

- Widiatmaka, P., Nuryadi, M. H., & Yuliandari, E. (2023). Harmonisasi Kehidupan Antarkelompok Etnis Melalui Coffee Shop dan Implikasinya terhadap Ketahanan Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Borneo Akcaya*, 9(2), 123–139.
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran, K. (2016). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 180–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.12002>
- Widiatmaka, P., & Yuliandari, E. (2024). Strategi Mengantisipasi Politik SARA pada Pemilu melalui Pendidikan Politik. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 18(1), 58–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.38075/tp.v18i1.382>